Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 31726-31734

Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas: Tinjauan Literatur tentang Potensi, Tantangan, dan Arah Kebijakan

Afni Wulandari[1], Aldri Frinaldi[2], Asnil[3]
[1,2,3] Universitas Negeri Padang
e-mail: Wulandariaaa2@student.unp.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang menekankan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, menghadapi tantangan spesifik dalam implementasi SDGs akibat karakter geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kerentanan lingkungan dan sosial yang tinggi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi, tantangan, dan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan meninjau keterkaitannya dengan administrasi publik dan kebijakan sosial berbasis SDGs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian literatur terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan publik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Kepulauan Anambas memiliki potensi besar pada sektor perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi biru, pencapaian pembangunan berkelanjutan masih dihambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketimpangan akses layanan dasar, serta belum optimalnya integrasi indikator SDGs dalam perencanaan dan implementasi kebijakan daerah. Artikel ini menegaskan pentingnya transformasi tata kelola administrasi publik, penguatan kebijakan sosial yang inklusif, serta kolaborasi multipihak untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang di wilayah kepulauan.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, SDGs, wilayah kepulauan

ABSTRACT

Sustainable development is a global agenda that emphasizes the integration of economic, social, and environmental aspects, as formulated in the Sustainable Development Goals (SDGs). Archipelagic regions, including the Anambas Islands Regency in the Riau Islands Province, face specific challenges in implementing the SDGs due to their geographic characteristics, limited infrastructure, and high environmental and social vulnerability. This article aims to analyze the potential, challenges, and policy direction of sustainable development in the Anambas Islands Regency by examining its relationship to public administration and SDG-based social policies. This research uses a qualitative approach through a literature review of scientific journals, academic books, reports from national and international institutions, and relevant public policy documents. The study results indicate that although the Anambas Islands have significant potential in the fisheries, marine tourism, and blue economy sectors, the achievement of sustainable development is still hampered by limited institutional capacity, weak cross-sectoral coordination, unequal access to basic services, and the suboptimal integration of SDG indicators in regional policy planning and implementation. This article emphasizes the importance of transforming public administration governance, strengthening inclusive social policies, and multi-stakeholder collaboration to ensure equitable, inclusive, and long-term sustainable development in the archipelagic region.

Keywords: sustainable development, SDGs, archipelagic regions

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi landasan utama dalam agenda pembangunan global sejak disahkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk dicapai pada tahun 2030 (Haq et al., 2025). SDGs menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menjamin kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (*United Nations*, 2024).

Wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, menghadapi tantangan khusus dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan karena karakter geografisnya yang terdiri atas pulau-pulau kecil dengan dominasi wilayah laut dengan luasan total perairan 1.262.686 ha (Silalahi & Sudarwati, 2018). Kondisi ini menciptakan tantangan struktural yang mirip dengan yang dihadapi oleh *small island developing states* (SIDS) di berbagai belahan dunia, yang sering kali menghadapi kerentanan ekonomi, tekanan lingkungan dari perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan masalah aksesibilitas ekonomi dan sosial (*Mycoo et al., 2022*).

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, khususnya pada sektor perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi biru, yang berperan sebagai sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Usaha budidaya perikanan, misalnya, menunjukkan peluang pasar yang masih terbuka dengan keberadaan berbagai komoditas ikan bernilai ekonomis tinggi yang dapat dikembangkan secara strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pariwisata maritim memiliki potensi sebagai penggerak utama peningkatan pendapatan asli daerah, terutama apabila didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sedang menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari penyusunan dokumen RPJPD 2025–2045. KLHS ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Kajian tersebut diarahkan untuk mengevaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengidentifikasi risiko ekologis, serta menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Namun, Kabupaten Kepulauan Anambas juga dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan aksesibilitas transportasi antarpulau, tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor perikanan, kerentanan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, serta terbatasnya kapasitas fiskal dan lemahnya integrasi perencanaan pembangunan

merupakan hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. Lebih lanjut, hasil evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah menunjukkan bahwa capaian sejumlah indikator pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi, masih belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kemiripan dengan pengalaman *Small Island Developing States* (SIDS), khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, serta meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat (Mycoo et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal termasuk pengembangan ekonomi biru, pelestarian lingkungan, pemberdayaan komunitas, serta peningkatan kapasitas institusional, guna memperkuat integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk merangkum tinjauan literatur terkait potensi, tantangan, dan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan praktik kebijakan pembangunan daerah yang adaptif terhadap konteks kepulauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review)* untuk menganalisis hubungan *antara Sustainable Development Goals (SDGs)*, administrasi publik, dan kebijakan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan resmi lembaga internasional dan nasional, serta dokumen kebijakan publik yang berkaitan dengan SDGs dan kebijakan sosial. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti *Google Scholar, Scopus, ScienceDirect*, SINTA, dan Portal Garuda dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji diprioritaskan berasal dari publikasi dalam rentang 10 hingga 15 tahun terakhir, kecuali karya teoretis klasik yang masih relevan secara konseptual.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan pendekatan tematik, di mana setiap literatur dikaji untuk mengidentifikasi konsep utama, kerangka teoritis, serta temuan empiris yang berkaitan dengan peran administrasi publik dalam perumusan dan implementasi kebijakan sosial berbasis SDGs. Hasil analisis kemudian dibandingkan dan disintesis secara sistematis untuk membangun argumen akademik yang koheren, mengungkap kesenjangan penelitian, serta merumuskan implikasi kebijakan yang relevan.

Keabsahan data melalui pemilihan sumber literatur yang kredibel, konsistensi analisis antar literatur, serta penggunaan pendekatan kritis dalam proses sintesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang berusaha menggabungkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan dalam satu kerangka terpadu (Novita & AP, 2025). Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, pembangunan dimaknai sebagai suatu proses transformasi yang bersifat multidimensi dengan mengintegrasikan secara simultan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip *leave no one behind* menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian agregat makro, tetapi dari kemampuan kebijakan publik dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk masyarakat pesisir dan wilayah kepulauan (Zaini et al., 2025).

Dalam perspektif administrasi publik, SDGs menuntut perubahan mendasar dalam cara pemerintah merancang dan mengimplementasikan kebijakan. Agenda SDGs bersifat lintas sektor, lintas level pemerintahan, dan lintas aktor, sehingga menantang model birokrasi tradisional yang cenderung sektoral dan hierarkis (Tuakara, 2025). Literatur administrasi publik kontemporer menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif, adaptif, dan berbasis bukti (*collaborative and adaptive governance*) sebagai prasyarat pencapaian SDGs. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai *policy integrator* yang menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan agar tidak saling bertentangan.

Pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan penguatan ekonomi maritim yang berkelanjutan berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sepanjang didukung oleh kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Nurhidayati et al. (2025) menegaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata Indonesia harus bertumpu pada pemberdayaan masyarakat lokal, pemanfaatan potensi maritim secara berkelanjutan, serta inovasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi pariwisata berbasis komunitas dan ekonomi maritim berkelanjutan tidak hanya memperkuat daya saing daerah, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat pesisir dan lokal (Nurhidayati et al., 2025).

Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan dinamika pembangunan berkelanjutan yang bersifat kompleks sekaligus strategis. Sebagai wilayah kepulauan terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Anambas dianugerahi sumber daya kelautan yang melimpah, potensi pariwisata bahari, serta posisi geopolitik yang signifikan. Oleh karena itu, karakteristik wilayah tersebut memiliki keterkaitan erat dengan

upaya pencapaian SDGs nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan SDGs nomor 14 tentang Ekosistem Laut**.** Sinergi kedua tujuan tersebut menjadi krusial agar pembangunan ekonomi di Kepulauan Anambas data mendorong kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan ekosistem laut.

Meskipun Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi sumber daya kelautan dan pariwisata yang besar, pemanfaatan potensi tersebut masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan sosial dan ketimpangan struktural. Akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur dasar, serta peluang kerja yang layak belum terdistribusi secara merata. Dalam kerangka kebijakan, pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Anambas masih menghadapi tantangan serius dalam pemerataan akses keseja hteraan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan pada sejumlah indikator kesejahteraan, namun ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik tetap menjadi persoalan utama, khususnya di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir terpencil. Kondisi ini mengindikasikan adanya *implementation gap* antara tujuan normatif Sustainable Development Goals (SDGs) dan kapasitas implementasi kebijakan di tingkat lokal

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan, pola alokasi sumber daya, serta orientasi kebijakan pembangunan yang cenderung lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi sektoral dibandingkan pemerataan dan keadilan sosial. Akibatnya, manfaat pembangunan pariwisata dan ekonomi maritim berisiko terakumulasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat pesisir dan nelayan tradisional tetap berada dalam posisi rentan. Situasi ini menunjukkan pentingnya integrasi prinsip leave no one behind dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah agar pencapaian SDGs tidak bersifat simbolik, melainkan benar-benar berkontribusi pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Dari sudut pandang administrasi publik, tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Anambas terletak pada keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya integrasi indikator SDGs ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun dokumen perencanaan seperti RPJPD dan RPJMD telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), implementasinya masih menghadapi kendala operasional, terutama dalam menyelaraskan program antar perangkat daerah dan memastikan konsistensi kebijakan lintas sektor.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas harus dipahami sebagai proses transformasi jangka panjang yang menuntut perubahan paradigma tata kelola pemerintahan dan orientasi kebijakan sosial. Tanpa transformasi pada level kelembagaan dan kebijakan, pembangunan berisiko berhenti pada tataran retorika perencanaan. Sebaliknya, apabila prinsip SDGs

diinternalisasikan secara konsisten dalam administrasi publik dan kebijakan sosial, Kepulauan Anambas memiliki peluang besar untuk mengonversi potensi sumber daya alam dan posisi strategisnya menjadi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat policy coherence dan sinergi implementasi SDGs. Kedua, diperlukan diversifikasi ekonomi wilayah dengan memperkuat sektor pariwisata berkelanjutan, budidaya perikanan yang ramah lingkungan, dan UMKM berbasis masyarakat agar ketergantungan pada migas dapat dikurangi. Ketiga, peningkatan akses layanan dasar dan infrastruktur di wilayah pesisir serta pulau-pulau terpencil harus menjadi prioritas agar kesejahteraan sosial masyarakat meningkat secara inklusif. Keempat, pemerintah daerah disarankan memasukkan indikator SDGs ke dalam sistem monitoring and evaluation pembangunan lokal sehingga setiap program dapat dievaluasi berdasarkan pencapaian target yang terukur. Terakhir, pengembangan kapasitas birokrasi melalui pelatihan, penggunaan teknologi informasi, dan prinsip good governance akan meningkatkan efektivitas administrasi publik dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan proses yang kompleks dan strategis, mengingat karakter wilayah kepulauan yang rentan secara ekologis namun kaya akan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata bahari. Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta SDGs 14 tentang Ekosistem Laut, menjadi kerangka penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Namun demikian, implementasi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Anambas masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, kesenjangan akses terhadap layanan dasar, serta ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. Dari perspektif administrasi publik, pencapaian pembangunan berkelanjutan menuntut perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju model yang kolaboratif, adaptif, dan terintegrasi. Pemerintah daerah perlu berperan sebagai policy integrator yang mampu menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kebijakan sosial yang transformatif dan berorientasi pada prinsip leave no one

behind. Tanpa transformasi kelembagaan dan penguatan kebijakan sosial yang inklusif, pembangunan berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan tidak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. (2024). Indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas 2023. BPS.

Bappenas. (2020). Roadmap SDGs Indonesia 2020–2030. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Coster, T., Kolopaking, L. M., & Falatehan, A. F. (2025). Community-based tourism for increasing local revenue in Kepulauan Anambas Regency. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 9(1), 1–15.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). Routledge.

Fukuda-Parr, S. (2016). From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development. Gender & Development, 24(1), 43–52. https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1145895

Grindle, M. S. (2017). Good governance, R.I.P.: A critique and an alternative. Governance, 30(1), 17–22. https://doi.org/10.1111/gove.12223

Haq, D. L. H. I. S., Priambodo, O. N., Putra, A. S. W. M. G., Wachjar, A. N. A., Yunta, T. N. A. K. A., & Sijabat, D. E. A. E. K. Paradigma Baru Keberlanjutan: Pendekatan Interdisipliner Dalam Sains Dan Kebijakan.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (4th ed.). Oxford University Press.

Kabupaten Kepulauan Anambas Government. (2025). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025–2045. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Khairina, E., Lodan, K. T., & Salsabila, L. (2025). Digital-based maritime tourism development policy in the Anambas Islands. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 39(2), 310–324. https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.3046

Kickbusch, I., & Gleicher, D. (2012). Governance for health in the 21st century. World Health Organization.

Meuleman, L. (2021). Public administration and governance for the Sustainable Development Goals. Sustainability, 13(11), 5914. https://doi.org/10.3390/su13115914

Mycoo, M., et al. (2022). Small islands: living laboratories revealing global climate and sustainable development insights. Frontiers in Climate.

Nenobais, H., & Viradiawan, V. (2025). Evaluation of development planning policy in Anambas Islands Regency. ICCD Journal.

Novita, A. A. A., Ap, S., & Ap, M. (2025). Governance For Sustainable Development. Selaras Media Kreasindo.

Novita, A., Ngindana, R., & Putra, E. (2025). Development and challenges in the implementation of Sustainable Development Goals in Indonesia. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, 5(2), 145–160. https://doi.org/10.33474/jisop.v5i2.21192

Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100(3), 641–672. https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641

Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). Governance, politics and the state (2nd ed.). Red Globe Press.

Shafitri, N., & Sujarwo, P. A. (2025). Potensi dan peluang pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Silalahi, S. A. F., & Sudarwati, Y. (2018). Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau Dan Provinsi Maluku Utara. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suryaka, A. H., & Ady, S. U. (2025). Sustainable airport development in Indonesia's border areas: Challenges and future prospects (Case study of Letung Airport, Anambas). Asian Journal of Social and Humanities.

Tinnike C., Kolopaking L. M., & Falatehan A. F. (2025). Pariwisata berbasis masyarakat untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kab. Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah.

Tosun, J., & Leininger, J. (2017). Governing the interlinkages between the Sustainable Development Goals: Policy integration in implementation. Global Challenges, 1(9), 1700036.

Triono, W., Wirdayanti, A., & Firdaus, A. (2025). Policy analysis of sustainable regional development in the utilization of Bawah Island, Anambas Islands Regency. International Journal of Social and Public Administration.

Tuakara, Y. (2025). Tata Kelola Perbatasan Yang Berkelanjutan: Sinergi Lintas Sektor Untuk Pembangunan Dan Keamanan Di Merauke. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1356-1368.

United Nations Development Programme. (2018). Governance for the Sustainable Development Goals: A guide for practitioners. UNDP.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

United Nations. (2024). Sustainable development in Indonesia. United Nations Indonesia.

World Bank. (2017). World development report 2017: Governance and the law. World Bank Publications.

Zaini, M., Se, M., Irmanelly, S. E., Azizs, M. D. A., & Sinaga, S. Pengantar Ekonomi Pembangunan.